

Ikhtisar

PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi filosofi bisnis kami "Baik untuk Negara, Baik untuk Masyarakat, Baik untuk Iklim, Baik untuk Pelanggan, dan Baik untuk Perusahaan. Kami percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dengan hormat dan bermartabat. Ini adalah tanggung jawab kami dalam menjalankan bisnis kami dengan menghormati hak asasi manusia diseluruh operasi kami. TPL menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia lokal dan internasional yang telah diratifikasi dan hukum yang berlaku, dengan pedoman sebagai berikut:

- Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia; (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs))
- RUU Hak Asasi Manusia Internasional yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work);
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples);
- Sepuluh prinsip yang tertera dalam United Nations Global Compact;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan/atau Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan.

Komitmen Kami

Kami:

Kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara nasional dan internasional sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi ILO, dan semua hukum yang berlaku seperti pedoman yang tertera diatas;

- Berkomitmen untuk menghindari, menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan mencegah atau mengurangi dampak merugikan hak asasi manusia.
- Berkomitmen untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang dirancang dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani pengaduan hak asasi manusia dengan cara yang bersahabat, sistematis dan etis.
- Berkomitmen untuk melindungi keamanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia, pelapor, pengadu, dan juru bicara masyarakat termasuk melindungi kerahasiaan dan anonimitas mereka (bila diminta dan sesuai hukum).
- Berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia secara setara bagi semua orang—tanpa memandang gender, termasuk tindakan preventif terhadap tindakan pelecehan seksual dalam segala bentuknya
- Berkomitmen untuk menghormati hak tenurial masyarakat adat dan adat istiadat mereka.
- Berkomitmen untuk menghormati orang dan komunitas melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan ("FPIC") dalam batas-batas operasi di tanah di mana mereka memegang hak hukum, komunal atau adat sebelum memulai operasi baru.
- Berkomitmen untuk menghormati hak-hak pekerja seperti;
 - Tidak ada toleransi terhadap perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja, segala bentuk kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan manusia, hukuman fisik atau jenis kekerasan lainnya.
 - Tidak ada pekerja anak (di bawah umur 18 tahun), , serta memastikan mekanisme hak asasi manusia jika ditemukan sudah masuk sebagai karyawan, akan ada mekanisme yang mengaturnya
 - Tidak ada toleransi terhadap pelecehan dan penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi dalam praktik pekerja kami seperti jenis kelamin, etnis, agama, ras, dan disabilitas.
 - Memastikan bahwa seluruh pekerja memiliki perjanjian kerja atau "syarat dan ketentuan kerja" sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku
 - Tidak ada kerja paksa dengan memastikan pekerja bebas meninggalkan pekerjaan atau berhenti dari pekerjaan mereka melalui pemberitahuan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan perjanjian kerja
 - Kebebasan pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dalam serikat pekerja.. Kami berusaha melindungi hak berorganisasi untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja kami secara langsung, atau tidak langsung melalui asosiasi pekerja mereka.
 - Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang
 - Menjamin perlakuan yang adil dan setara serta tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan termasuk dalam proses perekrutan, pekerjaan dan jabatan
 - Pengupahan yang layak dan sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Tidak membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan bahwa jam kerja reguler, jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat, dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk cuti, tunjangan-tunjangan yang berlaku dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan di tempat kami beroperasi
 - Memastikan terpenuhinya fasilitas kerja dan tempat tinggal yang layak bagi pekerja
 - Melibatkan para ahli yang relevan dan pemangku kepentingan lokal, seperti serikat pekerja/serikat buruh dalam meninjau hak-hak pekerja
 - Memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan, dipahami, dan dijalankan oleh perusahaan, pekerja, pemasok, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Toba Pulp Lestari Tbk.
- Berkomitmen untuk memantau dan meninjau secara berkala sistem pencegahan untuk kegiatan yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk hak asasi manusia untuk menentukan efektivitas dan memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan kebijakan ini.

Mengelola Dampak Hak Asasi Manusia

Kami berupaya untuk mengelola dan mengurangi resiko pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi dan seluruh rantai pemasok kami melalui kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Right Due Diligence - HRDD). Kami mengakui pentingnya masyarakat sekitar dan hak atas mata pencaharian mereka, hak-hak kelompok rentan (seperti kelompok masyarakat adat, perempuan, pekerja migran dan pekerja tidak tetap) di tempat kami beroperasi.

Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk:

- Mengembangkan dan menerapkan kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence - HRDD) untuk mengidentifikasi pemegang hak dan hak-hak asasi mereka, serta potensi dan dampak sesungguhnya dari kegiatan kami terhadap hak asasi manusia.
- Mencegah atau mengurangi setiap resiko pelanggaran hak asasi manusia yang teridentifikasi atau berpotensi merugikan terkait dengan kegiatan operasional kami.
- Memastikan kerjasama perusahaan untuk pemulihan (remediation) dari setiap dampak pelanggaran hak asasi manusia secara tepat waktu dan adil, dan melalui proses yang sah.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kami melibatkan pemangku kepentingan dan/atau perwakilan mereka dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Kami berkomitmen untuk:

- Melibatkan pemangku kepentingan terkait dan/atau perwakilan yang sah melalui dialog yang transparan.
- Mengakui pentingnya keberagaman dan kearifan lokal dalam komunitas kita serta memahami perbedaan kebutuhan dari kelompok-kelompok di dalam komunitas.
- Melibatkan pemasok perusahaan dalam hal pendekatan hak asasi manusia mereka untuk memastikan dampak sosial yang lebih luas.
- Membina kemitraan yang kuat dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal.

Mekanisme Pengaduan dan Akses ke Pemulihan

Kami menerima semua pengaduan melalui penyampaian keluhan kesah karyawan, mekanisme pengaduan eksternal dan penyelesaian konflik yang mengarah pada kesepakatan bersama, proses terbuka, transparan, dan konsultatif untuk menghormati pekerja dan hak-hak masyarakat adat dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Para pekerja dapat melaporkan masalah atau keluhan yang mereka hadapi melalui Employee & Industrial Relation dengan jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Semua keluhan dan masalah yang disampaikan akan dicatat dan diinvestigasi untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

Kami berkomitmen untuk:

- Memastikan bahwa tidak seorang pun akan dihukum karena menyampaikan dugaan pelanggaran kebijakan perusahaan, atau masalah apapun terkait hukum atau etika kepada manajemen
- Memastikan kerja sama dalam proses remediasi/pemulihan yang efektif secara tepat waktu, adil dan sah, termasuk melalui dialog dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Memantau keefektifan mekanisme keluhan kesah karyawan dan pengaduan eksternal perusahaan secara berkala.

Tata Kelola dan Pelaporan

Menghormati hak asasi manusia merupakan salah satu bagian terpenting dari pendekatan manajemen dan komitmen keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Kami memiliki Dewan Keberlanjutan yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi yang akan memastikan penerapan tata kelola keberlanjutan yang tangguh, termasuk hak asasi manusia. Hal ini juga diawasi oleh Tim Komisaris Independen yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara dan Badan Keberlanjutan, yang berfungsi sebagai saluran bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan keprihatinan dan keluhan mereka, di antara fungsi-fungsi lainnya.

Kami secara berkala akan meninjau dan melaporkan kemajuan implementasi kebijakan kepada pemangku kepentingan yang disampaikan melalui Laporan Keberlanjutan Tahunan perusahaan dan melalui situs web kami secara teratur. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pekerja, pemasok, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Toba Pulp Lestari Tbk. dan isi dari kebijakan ini akan terus dipantau dan ditinjau secara berkala.

Sandeep Bhalla
Managing Director